

## ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu terdapat syarat materiil dan syarat formil perkawinan yang harus dipenuhi karena bilamana syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan bilamana perkawinan sudah dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dilakukan dengan putusan pengadilan juga sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan selain karena kematian dan perceraian. Dibatalkannya perkawinan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti, harta benda dalam perkawinan dan berdampak pula pada anak apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak. Kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah pembatalan perkawinan karena beralihnya agama, pembatalan perkawinan pada perkawinan yang sudah putus karena kematian dan pembatalan perkawinan pada perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 2 (dua) permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pertama, Apa dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dan kedua, Apa akibat hukum terhadap status anak dan harta benda perkawinan dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuannya untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap status anak dan harta benda perkawinan dalam perkawinan yang dibatalkan.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, yaitu, dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan yang kemudian dianalisis berdasarkan pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan dasar hukum dalam hukum perkawinan. Kedua, akibat hukum pembatalan perkawinan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan dan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dan harta benda perkawinan bagi suami istri yang beritikad baik. Akibat hukum terhadap status anak adalah tetap menjadi anak yang sah dari kedua orangtuanya dan pembagian harta bersama bagi suami istri yang beritikad baik adalah masing-masing seperdua dari harta bersama namun tidak ada pembagian harta bersama bila atas adanya perkawinan terdahulu.

Kata Kunci : Perkawinan, Putusnya Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan.

## **ABSTRACT**

*Marriage is valid if done according to the laws of each religion and beliefs and are listed according to the legislation in force. In addition there are terms of material and formal requirements that must be met for marriage if the requirements are not met, then the marriage can be prevented or canceled if the marriage has been held. Cancellation marriage performed by a court decision as well as one form of marriage break apart due to death and divorce. Annulment of marriage will have an impact not only for a marriage partner, but also has implications for the parties relating to the marriage, such as, property in marriage and impact the child if the cancellation is made after having offspring or children. Cases discussed in this thesis is the cancellation of the marriage due to the shift of religion, annulment of marriage at the marriage broke up because of death and marriage annulment on the marriage does not take place in religion. In connection with this, there are two (2) issues raised in this thesis is the first, What is the basic consideration of the judge in the case of cancellation of marriage and secondly, what the legal consequences of the status of children and marital property in a marriage that was cancelled. The goal is to analyze the basic consideration of the judge in the case of cancellation of marriage and to analyze the legal consequences of the status of children and marital property in a marriage that was cancelled.*

*The approach used to analyze the problem in this research is the approach of legislation (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and the approach of the case (Case Approach).*

*The results showed that, first, annulment of marriage as an effort to termination of marriage and cancellation of a marriage begins after legally binding court ruling. Judge basic consideration in deciding the case of cancellation of marriage, that is, with the consideration that the marriage does not meet the terms of a valid marriage is then analyzed based on the evidence on the evidence submitted Plaintiff and Defendant and legal basis in marriage law. Secondly, the legal consequences of marriage annulment of marriages that do not qualify validity of a marriage is a marriage can be cancelled and the cancellation of the marriage ruling is not retroactive to children and marital property to husband and wife who in good faith. The legal consequences of the child's status is to remain a legitimate child of both parents and the division of joint property of husband and wife is the good faith of each half of the community property, but there is no division of joint property when on their previous marriages.*

*Keywords : marriage, marital breakup, and annulment of marriage.*